PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Elvan Pranata, 24151069, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas, Tahun 2026

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana Pemilu diatur dalam Pasal 476 dan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, implementasi penegakan hukumnya menghadapi tantangan di daerah dengan kondisi geografis khusus, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Kondisi kepulauan yang dipisahkan oleh laut dengan cuaca dan gelombang yang tidak menentu menjadi kendala dalam proses penyidikan, terutama karena terbatasnya waktu penanganan perkara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana Pemilu oleh Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?. 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung yuridis empiris. Data dalam penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses penyidikan tindak pidana Pemilu oleh Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan polisi, penerbitan Surat Perintah Penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti, gelar perkara, penetapan tersangka, hingga penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, penyidik juga melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sehingga proses penyidikan mencerminkan penerapan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang mengedepankan sinergi antar lembaga penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, profesional, serta memberikan kepastian hukum. 2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu keterbatasan waktu penyidikan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri atas wilayah kepulauan sehingga menyulitkan mobilitas penyidik, kesulitan dalam pengumpulan alat bukti dan menghadirkan saksi, serta perlunya koordinasi yang intensif dengan Bawaslu dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Penyidikan, Tindak Pidana

THE APPLICATION OF LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS TO THE INVESTIGATION OF ELECTION CRIMES IN MENTAWAI ISLANDS REGENCY

Elvan Pranata, 24151069, Bachelor of Laws Study Program, Faculty of Law, Social Sciences, and Humanities, Dharma Andalas University, 2026

ABSTRACT

The handling of election crimes is regulated under Articles 476 and 477 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. However, the implementation of law enforcement faces challenges in regions with unique geographical conditions, such as Mentawai Islands Regency, West Sumatra Province an area classified as 3T (Frontier, Outermost, and Underdeveloped). The archipelagic nature of the region, separated by seas with unpredictable weather and wave conditions, poses obstacles to the investigation process, particularly due to the strict time limits for case handling mandated by the law. The research questions addressed are: 1. How is the investigation of election crimes conducted by the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Mentawai Islands Resort Police (Polres) based on Law Number 7 of 2017? 2. What obstacles do investigators face when conducting investigations into election crimes in the Mentawai Islands Regency area? The research employs a normative juridical method supported by an empirical juridical approach. Data were obtained through literature review and interviews. The research results indicate that: 1) The investigation process for election crimes by the Criminal Investigation Unit of the Mentawai Islands Resort Police, based on Law Number 7 of 2017, proceeds through the following stages: receiving the police report, issuing the Investigation Order, questioning witnesses and suspects, gathering evidence, conducting a case exposition, designating suspects, and submitting the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) to the Public Prosecutor's Office. In practice, investigators coordinate intensively with the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the Public Prosecutor's Office through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu); this ensures the investigation process reflects the application of a criminal justice system that prioritizes synergy among law enforcement agencies to achieve effective, professional law enforcement and provide legal certainty. 2) Challenges faced by investigators in conducting investigations into election-related criminal offenses in the Mentawai Islands Regency include: time constraints mandated by legislation; the regency's archipelagic geography, which hinders investigator mobility; difficulties in gathering evidence and securing the presence of witnesses; and the necessity for intensive coordination with Bawaslu and the Public Prosecutor's Office via Sentra Gakkumdu.

Keywords: General Election, Investigation, Criminal Offense